

Strategi Adaptasi Penerapan Program MBKM yang Kolaboratif dan Partisipatif

Stefani Natalia Sabatini¹, Patricia Pahlevi Novianri², Sita Yuliasuti Amijaya³
stefanisabatini@staff.ukdw.ac.id¹, patriciapahlevi@staff.ukdw.ac.id²
Prodi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta Wacana^{1,2}

The Adaptation Strategy to Implement Participative and Collaborative Learning in The New Curriculum Framework of Freedom to Learn and Independent Campus

ABSTRACT

Freedom to Learn and Independent Campus (Merdeka Belajar- Kampus Merdeka or MBKM) was established by Indonesian Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) in 2020, creating challenges for Higher Education Institutions (HEIs). HEIs needs adaptation strategies to set up and implement the program. This article aims to discuss the adaptation strategies to be consider by HEIs in order to implement participative and collaborative learning for the new curriculum framework, especially in design-based study program for architecture major. Data collection method was done by survey, distributed questionnaires, interviewing the curriculum executant, and literature study. Data analysis was carried out using quantitative distributive method for questionnaires and qualitative textual analysis for interview data. As the result, there are five adaptation strategies found. They are (1) identifying similar program that already been conducted, (2) giving students freedom to choose by providing variation of program, (3) constructing a set of devices to perform the new curriculum, (4) integrating program funding with funder, and (5) starting simple activities.

Keywords: Strategy, Adaptation, Freedom to Learn-Independent Campus, MBKM

Article Info

Received date: 28 Desember 2021 Revised date: 12 September 2022 Accepted date: 28 September 2022

PENDAHULUAN

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan diluncurkan pada awal tahun 2020 (Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, 2020) telah memaksa prodi perguruan tinggi, atau yang sering juga disebut sebagai Higher Education Institutions (HEIs), untuk menilik kembali kurikulum dan menyelarasannya dengan MBKM. Penyelarasan ini termasuk menyesuaikan pilihan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM ini dan juga teknis pelaksanaannya. Dengan adanya kelas studio perancangan sebagai inti atau *backbone* pada kurikulum prodi berbasis desain, termasuk prodi arsitektur, penyesuaian program MBKM dengan kurikulum menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan strategi dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Meskipun saat ini telah banyak prodi yang menerapkan MBKM, hanya ditemukan dua artikel terpublikasi yang berkaitan dengan MBKM di prodi arsitektur. Keduanya berisi dukungan akan pelaksanaan berbagai BKP MBKM di prodi Arsitektur dan BKP MBKM yang dipilih diterapkan pada prodi arsitektur di perguruan tinggi masing-masing di Yogyakarta (Febriarto, 2020 dan Rusmana, 2020)), namun tidak membahas penyesuaian yang dilakukan untuk mengaplikasikan MBKM. Tulisan ini akan membahas mengenai strategi adaptasi yang dapat dipertimbangkan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan BKP MBKM yang kolaboratif dan partisipatif, terutama pada prodi berbasis desain seperti prodi arsitektur. Artikel ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi prodi arsitektur, atau prodi lain berbasis desain di perguruan tinggi lain yang juga tengah mengembangkan BKP MBKM di kampusnya.

KAJIAN PUSTAKA

Penerapan MBKM memang merupakan tantangan bagi perguruan tinggi, namun sebetulnya sudah selaras dengan kegelisahan prodi perguruan tinggi, termasuk prodi arsitektur, berkaitan dengan

pembelajaran yang harus lebih kolaboratif. Sebagai contoh, saat ini *scripting* dan *coding* adalah bahasa ketiga dalam berarsitektur, sementara pengetahuan tersebut sebetulnya lebih banyak dipelajari di bidang informatika yakni bidang di luar arsitektur (Winata, 2020:10). MBKM juga diperkirakan mampu meningkatkan kreativitas dan kemandirian mahasiswa untuk selalu berinovasi demi mencari pengetahuan baru (Febriarto, 2020:108), yang menunjukkan partisipasi mahasiswa dalam pembelajarannya di perguruan tinggi. Kolaborasi dan partisipasi ini adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yakni IKU 7 (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2021:34). Bersama dengan IKU 2: “pengalaman di luar kampus”, IKU 7 menjadi indikator yang mendasari arahan pelaksanaan MBKM untuk diterapkan pada prodi-prodi di perguruan tinggi termasuk prodi arsitektur.

Ketika prodi akan menerapkan MBKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan empat tahapan implementasi MBKM. Tahapan tersebut adalah (a) mengidentifikasi kegiatan akademik yang sudah berjalan dan merancang kegiatan baru yang mungkin dilaksanakan; (b) mengakses buku panduan implementasi MBKM untuk mendapatkan panduan pengembangan kurikulum; (c) mengembangkan kurikulum prodi berikut dengan dokumen kerja sama dengan mitra perguruan tinggi; serta (d) menyusun implementasi MBKM (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020:16). Melengkapi itu, persiapan implementasi MBKM ini dapat dijelaskan dalam tiga poin besar yang membawahi tujuh poin lain (Purwanti, 2021:387). Tujuh poin persiapan ini berisi meningkatkan kualitas internal institusi dengan 1) mempersiapkan *softskill* dan *hardskill* mahasiswa yang nantinya yang akan dilibatkan dalam program MBKM; 2) membuat penyesuaian kurikulum; kemudian, menetapkan posisi institusi dengan 3) publikasi yang melibatkan media sosial; 4) menetapkan kerja sama dengan mitra yang saling sepakat; 5) meningkatkan rangking institusi; serta menetapkan mekanisme yang memudahkan mahasiswa beralih ke dunia kerja yakni 6) *career self – management*; dan 7) *career building – skill* (Purwanti, 2021:387). Pada poin persiapan *softskill* dan *hardskill* mahasiswa, salah satu hal penting di dalamnya adalah termasuk kemampuan berpikir kritis dalam proses menganalisis, mengevaluasi, dan mengreasi (Anugraheni, 2019:282). Berpikir kritis juga salah satu keterampilan yang harus dimiliki pelajar abad ke-21 (*Assessment and Teaching of 21st Century Skills* dalam Lathif dkk., 2022:279, *Partnership for 21st Century Skills*, 2015 dalam Hunaepi dkk., 2020:269). Dari data di atas, terlihat bahwa penyesuaian kurikulum prodi merupakan tahap penting dalam persiapan penerapan MBKM pada prodi perguruan tinggi.

Secara lebih spesifik, pada penyusunan kurikulum prodi dengan kebijakan MBKM, terdapat lima strategi penyesuaian. Langkah tersebut yakni: (a) menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka; (b) memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam perguruan tinggi; (c) menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa luar program studi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya; (d) melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi; dan (e) penyiapan alternatif mata kuliah daring bagi mata kuliah yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi (Baharuddin, 2021:198). Strategi penyesuaian kurikulum ini juga dapat ditahapkan dalam empat aktivitas yakni (1) menemukan SKS yang setara bagi delapan BKP MBKM; (2) menemukan mata kuliah substitusi yang mengakomodasi delapan BKP MBKM; (3) memformulasikan kembali jumlah SKS pada mata kuliah inti (*core subject*) prodi; (4) mendesain sistem konversi mata kuliah antar prodi di dalam dan luar perguruan tinggi (Purwanti, 2021: 338).

Ketika mendesain penyesuaian kurikulum, penyesuaian perlu dilakukan spesifik untuk masing-masing BKP MBKM yang akan diterapkan. Pada prakteknya, dari delapan BKP MBKM, tidak semua dapat secara mudah diaplikasikan pada prodi yang memiliki sifat kekhasan yang berbeda. Prodi arsitektur misalnya, menunjukkan kecenderungan untuk memilih BKP MBKM berupa magang dan penelitian (Febriarto, 2020:108 dan Rusmana, 2020:119) serta BKP MBKM Membangun Desa melalui pengabdian (Rusmana, 2020:119).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini bersifat deskriptif. Subjek tulisan ini adalah Prodi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta pada tahun 2021. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei. Survei diperoleh dari (1) penyebaran kuesioner Survei Implementasi

MBKM 2021 di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 2021 oleh Kemendikbud yang diisi oleh 167 mahasiswa aktif di prodi subjek dari berbagai angkatan; (2) wawancara daring dengan enam orang anggota dekanat fakultas dari prodi subjek; serta (3) wawancara daring dengan dua dosen pengajar dan satu sampel mahasiswa peserta mata kuliah yang dibuka untuk prodi di luar prodi subjek dalam satu institusi perguruan tinggi. Kuesioner Survei Implementasi MBKM 2021 di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 2021 merupakan survei yang didesain oleh Kemendikbud sehingga instrumennya, baik pertanyaan maupun pilihan jawaban, tidak dapat diubah. Survei pada pustaka juga dilakukan dengan membaca laporan dan notulensi kegiatan hibah MBKM berjudul Rancangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Arsitektur Berbasis Integrasi Hard skill dan Soft skill yang Inovatif Program Studi Arsitektur, Universitas Kristen Duta Wacana yang dilaporkan pada Desember 2020.

Metode analisis data yang dipilih adalah analisis data kuantitatif distributif untuk data kuesioner dan analisis data teks kualitatif untuk hasil wawancara. Instrumen pada kuesioner Survei Implementasi MBKM 2021 di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 2021 yang digunakan dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan (a) preferensi minat BKP MBKM di prodi subjek, (b) preferensi minat BKP MBKM di prodi subjek, serta (c) faktor kekhawatiran mahasiswa dalam mengikuti MBKM. Pada pertanyaan preferensi minat BKP MBKM dan faktor kekhawatiran dalam mengikuti MBKM, responden diizinkan memilih lebih dari satu jawaban sehingga total data pada pertanyaan tersebut dapat melebihi jumlah responden. Wawancara dengan dekanat selaku pemangku fakultas dari prodi subjek, pada Desember 2021, membahas beberapa instrumen, antara lain, (1) tingkat dan kesiapan dalam melaksanakan MBKM, (2) preferensi BKP MBKM yang paling prospektif untuk diterapkan pada fakultas atau prodi subjek, (3) pelaksanaan MBKM di fakultas subjek, (4) kendala yang dialami dalam penerapan MBKM, (5) dampak pelaksanaan MBKM di fakultas subjek, (6) saran berkaitan dengan penerapan MBKM, dan (7) bentuk dukungan yang diharapkan dalam penerapan MBKM. Wawancara dengan dosen pengajar dan satu sampel mahasiswa peserta mata kuliah yang dibuka untuk prodi di luar prodi subjek membahas tentang evaluasi pelaksanaan mata kuliah tersebut dan saran pengembangan di masa depan.

Seluruh data kemudian disusun dalam kerangka strategi adaptasi penerapan MBKM, terutama yang bersifat partisipatif dan kolaboratif, dengan studi kasus prodi subjek.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat lima strategi yang dapat digunakan untuk melengkapi strategi pelaksanaan MBKM yang sudah dibahas oleh penelitian sebelumnya. Dua dari lima strategi ini memperkuat temuan pustaka yakni (1) identifikasi BKP Serupa yang sudah berjalan dan (2) penyusunan perangkat pelaksanaan MBKM. Tiga strategi lain yang ditambahkan berdasarkan temuan data adalah (3) menyediakan variasi Pilihan BKP untuk merdeka memilih, (4) integrasi pendanaan dengan pihak pemilik modal atau hibah, serta (5) memulai dari yang sederhana. Sisi kolaborasi dan partisipasi akan dibahas pada setiap strategi.

Strategi 1: Identifikasi BKP Serupa yang Sudah Berjalan

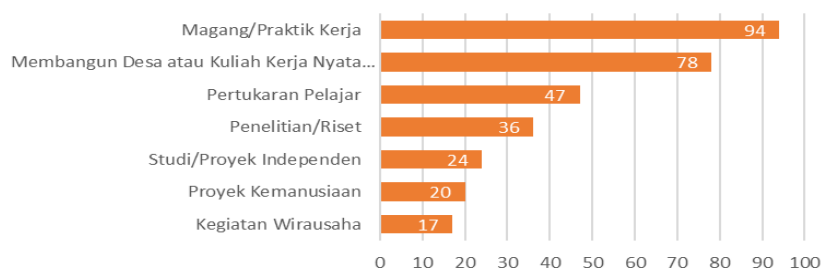
Strategi pertama yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi BKP serupa yang sudah berjalan. Strategi ini sejalan dengan saran tahapan pertama yang disarankan Kemendikbud (2020) dalam tahapan implementasi MBKM. Sebagai contoh pada prodi subjek, melalui kurikulum lama sebelum MBKM, prodi telah memiliki mata kuliah wajib berupa Magang dan Kerja Praktek, mata kuliah wajib berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), mata kuliah pilihan yang diampu dua prodi, Joint Studio Perancangan Arsitektur bersama kampus lain, serta membantu masyarakat dalam kondisi darurat bencana. Mata kuliah magang dan kerja praktek di biro arsitektur atau proyek konstruksi selaras dengan BKP MBKM Magang. Prodi subjek juga telah menginisiasi beberapa KKN Tematik di berbagai provinsi, seperti Sumba Tengah dan Buton, yang selaras dengan BKP MBKM Membangun Desa/ KKN Tematik. Mata kuliah pilihan yang diampu dua prodi dan Joint Studio Perancangan Arsitektur dengan prodi serupa di perguruan tinggi lain membuka jejaring dengan mitra untuk dapat membuka BKP MBKM Pertukaran Pelajar. Pada saat terjadi gempa di Yogyakarta tahun 2006 dan letusan Gunung Merapi 2010, prodi subjek juga turut andil mendukung pemulihan masyarakat sesuai bidangnya yakni dalam perancangan dan pembangunan toilet umum dan relokasi hunian, di mana program ini sejalan dengan BKP MBKM Proyek Kemanusiaan.

Pada semua kegiatan yang tercantum di atas, sisi partisipasi dan kolaborasi telah terbukti tercapai. Kegiatan berlangsung tidak hanya antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), namun juga dengan mitra sehingga kegiatan bersifat kolaboratif. Kegiatan juga membuat mahasiswa secara aktif mengerjakan kegiatan dengan diskusi dan kerja sama dengan mitra sehingga berjalan partisipatif. Kedua aspek ini bersinergi dengan pemikiran teoritis dan diturunkan kepada langkah kerja praktis yang kontekstual karena realisme memerlukan pikiran yang praktis (Pidarta, M., 2007 dalam Rodyyah, 2021: 431).

Sudah adanya BKP serupa dengan MBKM ini merupakan potensi. Berdasarkan hasil wawancara pada pemangku fakultas subjek, memilih perencanaan BKP MBKM berdasarkan BKP yang sudah dilakukan merupakan modal dasar yang baik karena beberapa alasan. (1) Bahkan sebelum muncul MBKM, BKP tersebut telah terbukti bersifat partisipatif dan kolaboratif. (2) Prodi telah berpengalaman melaksanakan BKP tersebut. (3) Prodi telah memiliki jejaring mitra untuk menjalankan BKP dengan model serupa. (4) Secara capaian, BKP yang sudah dilaksanakan tersebut sudah memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang sudah selaras dengan kekhasan prodi dan konversinya tidak mengurangi kualitas profil lulusan. Sebagai aplikasi, pada prodi subjek, perencanaan MBKM diarahkan kepada BKP yang dengan bentuk yang sudah familiar dengan prodi subjek yaitu Magang, KKN Tematik, dan Pertukaran Pelajar. Proyek Kemanusiaan MBKM tidak direncanakan karena, berdasarkan pengalaman, bersifat insidental, tergantung pada kondisi darurat yang membutuhkan dukungan. Penerapan BKP Magang dan KKN Tematik yang mengarah pada pengabdian masyarakat selaras juga dengan analisis potensi prodi serupa di salah satu kampus di kota yang sama (Rusmana, 2020:119).

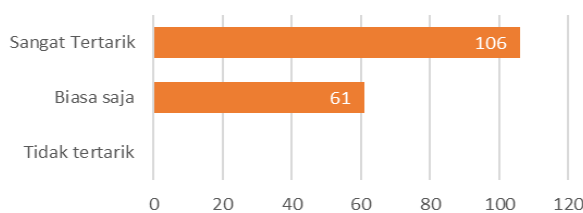
Strategi 2: Menyediakan Variasi Pilihan BKP untuk Merdeka Memilih

Berdasarkan kuesioner, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1, dari delapan BKP MBKM, mahasiswa pada prodi subjek memiliki minat terutama pada BKP Magang dan KKN Tematik, disusul oleh Pertukaran Pelajar dan Riset. Yang menarik, meskipun jumlahnya tidak signifikan, tapi BKP lain pun; Penelitian/ Riset, Studi/ Proyek Independen, Proyek Kemanusiaan, dan Kegiatan Wirausaha; tetap memiliki peminat. Hal ini menunjukkan bahwa, bahkan dalam satu prodi dengan kekhasan khusus, mahasiswanya dapat memiliki beragam minat, termasuk dalam memilih BKP MBKM.



Gambar 1. Grafik preferensi minat BKP MBKM di prodi subjek

Pengembangan pemilihan BKP dapat diarahkan mengikuti minat dari mahasiswa dan diperkuat dengan preseden pelaksanaan pada prodi. Sebagai contoh, berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku fakultas subjek, pada prodi subjek, mahasiswa sering menjadi asisten penelitian dosen. Namun begitu, penghargaan hanya diberikan dalam bentuk honor asisten. Selain itu, di luar dari rangkaian perkuliahan, belum ada mahasiswa yang mengajukan penelitian secara mandiri. Hal-hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesempatan proses kaderisasi peneliti mahasiswa dimulai dengan penggalan potensi melalui proses menjadi asisten penelitian dosen yang saat ini sudah berjalan. Melihat dari minat BKP Penelitian pada hasil survei, prodi subjek dapat mempertimbangkan perencanaan skema BKP tersebut dan petunjuk teknis pelaksanaannya untuk nantinya ditawarkan kepada mahasiswa yang memiliki minat dan kapasitas di bidang penelitian.



Gambar 2. Grafik preferensi minat BKP MBKM di prodi subjek

Ketertarikan mahasiswa terhadap program MBKM berdasarkan hasil kuesioner adalah cukup tinggi. Meski tidak ada yang menjawab “tidak tertarik”, namun hampir 40% (lihat Gambar 2) dari responden memiliki ketertarikan yang sedang terhadap program MBKM ditandai dengan pilihan “biasa saja”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi merdeka, mahasiswa memiliki kebebasan, tak hanya untuk memilih jenis BKP MBKM untuk belajar di luar kampus, namun juga bebas memilih untuk tetap belajar sesuai dengan kurikulum reguler tanpa program MBKM. Kebebasan mahasiswa untuk memilih ini adalah bentuk partisipasi mahasiswa terhadap langkah studinya di perguruan tinggi. Tanggung jawab prodi adalah membuka pilihan tersebut dan menawarkannya kepada mahasiswa sembari terus meningkatkan skema kurikulum yang mendukung ketercapaian kualitas lulusan.

Strategi 3: Penyusunan Perangkat Pelaksanaan MBKM

Strategi adaptasi selanjutnya adalah penyusunan perangkat pelaksanaan MBKM. Penyusunan ini dilakukan dengan melakukan penyesuaian kurikulum prodi untuk MBKM serta menyusun petunjuk teknis untuk menjalankan MBKM. Penyesuaian kurikulum prodi dilakukan dengan melakukan perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan yang dimaksud adalah penetapan profil lulusan, rumusan CPL yang diharapkan, kemudian sinkronisasi dengan program MBKM. Perencanaan spesifik selanjutnya adalah dengan menentukan hal-hal detail dari BKP MBKM yakni hal-hal berkaitan dengan proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi (Baharuddin, 2021:204).

Prodi subjek telah menerima hibah penyusunan kurikulum MBKM pada tahun 2020 dan melakukan proses penyesuaian kurikulum untuk dapat selaras dan mengakomodasi mahasiswa yang ingin mencoba perkuliahan dengan jalur program MBKM. Kurikulum sebelumnya pada prodi subjek, yakni Kurikulum KKNi 2016, sebetulnya telah mampu merespon perkembangan kebutuhan lulusan, serta kebutuhan mahasiswa dalam mendapatkan sumber pengetahuan di luar lingkungan kampus dengan bobot Satuan kredit semester (SKS) yang sudah disepakati. Pada kurikulum tersebut, pembelajaran yang dilaksanakan di luar kampus dilaksanakan melalui skema Praktek Profesi (3 SKS), Magang (7 SKS dengan konversi pada mata kuliah dengan 3 SKS, yaitu Praktek Profesi dan 4 SKS pada mata kuliah Studio Tematik) serta kesempatan untuk memilih lokasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik yang dilaksanakan di berbagai lokasi di Indonesia. Melalui hibah yang diterima, pembaruan kurikulum prodi subjek dilakukan untuk merespon MBKM sehingga dilahirkanlah Kurikulum 2021. Selain itu, kurikulum dibentuk dengan melibatkan kolaborasi pihak eksternal (Sopiansyah dkk., 2022:39), yakni melibatkan pula pengguna lulusan untuk memberikan masukan terkait profil lulusan yang digunakan untuk menilik ulang CPL prodi. Bentuk penyesuaian yang dilakukan antara lain menentukan BKP yang akan dilaksanakan, menentukan semester berapa BKP tersebut akan dibuka pada bagan alir kurikulum, serta menyelaraskan seluruh mata kuliah yang seharusnya diambil mahasiswa di semester tersebut sehingga relatif setara apabila dikonversikan dengan SKS dari BKP MBKM yang ditawarkan. Diagram bagan alir kurikulum disusun secara grafis sehingga sinkronisasi antara kurikulum dengan program perkuliahan reguler dan program MBKM dapat lebih mudah dipahami.

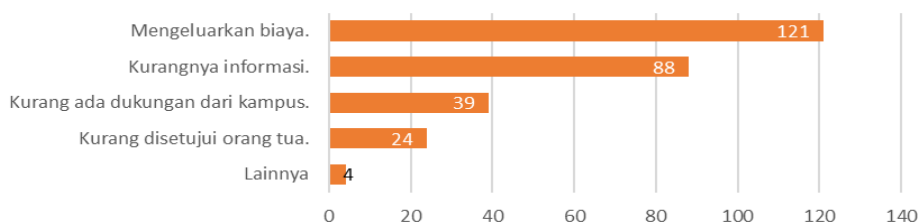
Untuk mempermudah melaksanakan program, dibuat pula petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini salah satunya berisi persyaratan peserta MBKM, seperti minimum SKS yang telah ditempuh; minimum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); serta kesiapan mahasiswa. Hal ini diperlukan untuk memastikan agar BKP MBKM dapat memenuhi konversi CPL dengan baik.

Pada praktek perencanaan yang lebih aplikatif, DPL pelaksana BKP MBKM akan mengecek seluruh CPL dari mata kuliah kurikulum dengan program perkuliahan reguler yang akan dikonversi dengan kepada BKP MBKM tersebut. CPL tersebut diaplikasikan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari BKP MBKM sehingga konversi yang nantinya akan dilakukan dapat lebih mudah

divalidasi. Tentu pada praktiknya di lapangan, pelaksanaan BKP MBKM tidak selalu ideal sehingga tidak semua CPL bisa dicapai setara dengan perkuliahan reguler. Olehnya, institusi, dalam hal ini prodi, dapat menentukan persentase toleransi ketercapaian CPL yang terkonversi sehingga fleksibilitas BKP MBKM yang tidak selalu dapat dikontrol tetap dapat diakomodasi dalam tingkatan yang wajar.

Strategi 4: Integrasi Pendanaan dengan Pihak Pemilik Modal atau Hibah

Berdasarkan hasil survei, seperti yang tampak pada Gambar 3, ditemukan bahwa faktor kekhawatiran mahasiswa dalam mengikuti MBKM di luar kampus adalah, yang pertama biaya, kemudian kurangnya informasi, disusul dengan kurangnya dukungan dari kampus, dan persetujuan orang tua. Jawaban “lainnya” meliputi keterbatasan waktu, kultur kampus yang berbeda sehingga bisa terjadi gap sosial antar mahasiswa, kurang adanya dukungan dari mitra termasuk tempat magang, dan risiko untuk menjadi tidak fokus dalam program studi yang sebenarnya. Lebih dari 70% responden menekankan bahwa biaya merupakan kekhawatiran terbesar untuk mereka mengikuti MBKM di luar kampus. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan fakultas subjek yang menunjukkan bahwa pelaksanaan beberapa BKP memerlukan pengeluaran yang tidak sedikit. Pada fakultas subjek misalnya, pengeluaran ini digunakan untuk berkoordinasi dengan mitra, operasional DPL, dan operasional mahasiswa di luar kampus. Untuk beberapa model BKP, misalnya KKN Tematik, masih ada sejumlah pengeluaran yang tidak dapat dipenuhi dengan pembayaran 20 SKS dari mahasiswa kepada universitas, termasuk tambahan dukungan dari institusi. Akibatnya, perlu ada biaya yang dibebankan kembali kepada mahasiswa yang tingkat ekonominya berbeda-beda.



Gambar 3. Grafik faktor kekhawatiran mahasiswa dalam mengikuti MBKM

Berkaca pada pengalaman di fakultas prodi subjek, masalah pendanaan pelaksanaan BKP serupa dapat teratasi melalui integrasi dengan pihak pemilik modal atau hibah. Strategi seperti ini disebut strategi integrasi (David 2004:231 dalam Arifin, 2017:119). Sebagai contoh, prodi rekanan prodi subjek dalam satu fakultas mendapatkan hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) sehingga operasional kegiatan MBKM termasuk hingga mengadakan pameran hasil MBKM dapat didukung dengan dana hibah. Sebagai contoh kasus lain di prodi subjek, sebuah program KKN Tematik direncanakan dapat direalisasikan karena mendapat persetujuan sokongan dana cukup besar dari salah satu kabupaten di Indonesia Timur yang menjadi lokasinya. Melihat hal tersebut, pelaksanaan BKP MBKM akan lebih visibel apabila diintegrasikan dengan pemilik modal atau pemberi hibah sehingga program tidak hanya menjadi kesempatan bagi mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang cenderung menengah ke atas saja.

Saran lain yang diperoleh dari wawancara pihak pemangku fakultas subjek ditujukan pada pihak pemerintah yang mendorong pelaksanaan MBKM, pada kasus ini, Kemendikbud. Saran tersebut adalah agar pemerintah dapat membantu proses adaptasi MBKM ini dengan menyediakan skema pendanaan yang menghubungkan pemilik modal, misal CSR perusahaan, dengan perguruan tinggi yang akan melaksanakan MBKM. Bentuk kolaborasi seperti ini dapat menjadi solusi dari masalah pendanaan ini.

Strategi 5: Memulai dari yang Sederhana

MBKM sejatinya merupakan salah satu cara untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi nomor 2 dan 7 yakni “mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus” dan “kelas yang partisipatif dan kolaboratif”. Untuk mencapai signifikansi pencapaian IKU 2 dan 7, disampaikan bahwa penerapan BKP MBKM harus dalam bingkai 20 SKS sesuai ketentuan program MBKM yang dilaksanakan dalam satu semester. Oleh karenanya, BKP MBKM yang belum diterapkan dengan konversi 20 SKS dianggap belum secara signifikan mencapai IKU 2 dan IKU 7. Meskipun demikian, apabila masih kesulitan mengelola BKP MBKM dengan 20 SKS, penerapan BKP

MBKM dengan SKS lebih kecil masih dapat menjadi jembatan bagi prodi untuk belajar mengelola dan mempersiapkan BKP MBKM setara 20 SKS.

Di prodi subjek, pelaksanaan MBKM Pertukaran Pelajar dimulai dengan membuka Mata Kuliah Pilihan (MKP) yang dikelola oleh prodi subjek dan dibuka bagi prodi lain di dalam satu perguruan tinggi. Berdasarkan wawancara dengan dosen pengelola MKP, diperoleh informasi bahwa terdapat dua mahasiswa prodi lain yang mengikuti perkuliahan ini dengan mayoritas (sekitar 30 orang) mahasiswa berasal dari prodi subjek. Secara dinamika kelas, keberadaan dua orang mahasiswa dari prodi lain ini tidak mengubah dinamika diskusi di kelas yang biasanya homogen dikarenakan perbandingan jumlah mahasiswanya yang masih terlalu kecil. Meski begitu, ada beberapa pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan ini.

1. Perencanaan dan pelaksanaan pertukaran pelajar pada praktiknya tetap tidak sama dengan pembelajaran ketika kelas bersifat reguler dan homogen. Pertukaran pelajar sejatinya memang berarti mahasiswa luar menyesuaikan diri dengan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di prodi atau perguruan tinggi lain. Meskipun demikian, pada prakteknya, pengajar tidak mungkin tidak memikirkan kebutuhan dari mahasiswa tersebut. Penyesuaian persiapan, pelaksanaan, hingga pemilihan tugas oleh pengajar perlu dilakukan agar mata kuliah dapat sesuai dengan konteks pembelajaran dari mahasiswa pendatang tersebut. Artinya, tambahan usaha yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian proses pembelajaran adalah mutlak.
2. Pelaksanaan administrasi pertukaran pelajar memerlukan petunjuk pengaturan sistem registrasi yang disepakati bersama dan mudah dipahami oleh berbagai pihak di level institusi perguruan tinggi.
3. Pelaksanaan pertukaran pelajar idealnya menguntungkan kedua pihak. Dalam kasus ini, kehadiran prodi lain yang harapannya dapat memberikan warna, perspektif, bahkan pengetahuan baru dalam memandang topik yang dibahas dalam MKP tidak terpenuhi secara signifikan karena jumlah mahasiswa luar yang sedikit. Sebagai pembelajaran, ketika menyusun BKP serupa, prodi perlu mempertimbangkan bentuk kerja sama yang dapat menguntungkan kedua pihak. Bentuk kerja sama yang mungkin digunakan adalah dengan memastikan pertukaran bersifat “saling”, artinya tidak hanya mahasiswa luar prodi yang masuk (*inbound*) dan belajar dari prodi subjek melainkan mahasiswa dalam prodi yang juga keluar (*outbound*) dan belajar dari luar prodi subjek.

Pada semester yang sama dengan pelaksanaan MKP di atas, perguruan tinggi dari prodi subjek memperoleh hibah Program Pengembangan Pemberdayaan Desa (P3D) di mana sekitar dua puluh mahasiswa, enam di antaranya adalah dari prodi subjek, mengerjakan program serupa KKN Tematik / Membangun Desa. Program P3D bersama warga lokasi mitra ini dikerjakan mahasiswa sembari melakukan perkuliahan reguler. Luaran program mayoritas dihasilkan dalam bentuk konstruksi dan pameran yang dibiayai hibah P3D. Pada perjalanannya, kegiatan P3D ini kemudian diajukan untuk dikonversikan menjadi KKN bagi mahasiswa pelaksana dengan bobot 3 SKS dan tambahan penghargaan yang akan dicantumkan pada SKPI. Beberapa hal yang dapat dipelajari dari pelaksanaan P3D ini adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan positif di luar kampus dapat disetarakan dengan SKS KBM perguruan tinggi. Penyetaraan ini adalah bentuk penghargaan bagi mahasiswa atas pembelajaran di luar kampus yang telah dilakukannya sekaligus sarana pengefektifan waktu studi (Menteri Nadiem dalam Astunggoro & Huda, 2021). Semangat belajar di luar kampus dan efektifitas waktu pembelajaran ini adalah bagian dari semangat yang diusung dalam program MBKM. Sebagai kontrolnya, DPL dapat menganalisa ketercapaian CPL untuk mengonfirmasi pengajuan konversi SKS dengan mata kuliah tertentu.
2. Sejalan dengan Strategi 4 yang sudah disampaikan sebelumnya, kesempatan hibah merupakan kesempatan untuk mendukung kegiatan yang biasanya memerlukan pembiayaan dalam jumlah besar. Di masa yang akan datang, hibah seperti ini dapat direncanakan untuk disinkronkan dengan BKP MBKM. Dalam rangka sinkronisasi tersebut, maka capaian kegiatan perlu diatur agar konversi setara 20 SKS dapat tersetarakan dengan baik.

Sebagai konklusi, pada Strategi 5, pelaksanaan BKP MBKM yang belum mencapai 20 SKS memang tidak memenuhi signifikansi pencapaian IKU 2 dan 7. Meski begitu, proses pelaksanaan ini dapat memberikan pengalaman, pembelajaran, bahkan kesempatan untuk membekali persiapan pelaksanaan BKP MBKM selanjutnya dengan skala yang lebih besar. Oleh karenanya, prodi yang belum melaksanakan MBKM sama sekali dapat memulai dari program serupa yang lebih sederhana.

Pembahasan

Strategi Adaptasi

Kelima strategi yang sudah disampaikan sebelumnya berdasarkan pengalaman pada prodi subjek sejalan dengan temuan dari studi lain terkait MBKM yang sudah diterbitkan. Seperti telah tertera pada kajian pustaka, strategi 1, yakni “identifikasi BKP serupa yang sudah berjalan”, merupakan tahapan pertama dari empat tahapan implementasi MBKM yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020:16). Strategi ini telah menjadi aspek kekuatan pada analisis SWOT pelaksanaan MBKM di perguruan tinggi lain (Yoesdiarti dkk., 2022:78) bahkan juga telah diterapkan pada prodi yang serupa prodi subjek (Febriarto, 2020:108 dan Rusmana, 2020:116). Hal ini menjadi efektif karena pelaksanaan program MBKM tidak perlu menginisiasi dari awal dan hanya perlu menyesuaikan dengan kegiatan yang sebelumnya sudah ada.

Strategi 2, yaitu “menyediakan variasi pilihan BKP untuk merdeka memilih” berfokus pada peningkatan jumlah variasi BKP. Peningkatan jumlah variasi seperti ini disebut sebagai strategi diversifikasi (David 2004:231 dalam Arifin, 2017:119). Strategi seperti ini dapat meningkatkan probabilitas jumlah mahasiswa yang mengambil program MBKM. Untuk itu, prodi perlu mempertimbangkan menawarkan variasi BKP MBKM sehingga, paling tidak, mahasiswa yang tertarik melaksanakan program MBKM, memiliki kesempatan untuk memilih BKP yang dirasa paling sesuai dengan minatnya. Hal ini sejalan dengan semangat Menteri Pendidikan, Nadiem, di mana konsep “Merdeka Belajar” berarti memberikan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai (Astutik dkk., 2022: 46).

Strategi 3, yaitu “penyusunan perangkat pelaksanaan MBKM” sejalan dengan tahapan kedua dan ketiga dari empat tahapan implementasi MBKM yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahapan strategi ini sangat berkaitan dengan pembuatan kurikulum serta dokumen kerja sama mitra perguruan tinggi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020:16). Kurikulum menjadi penting dalam strategi pelaksanaan MBKM (Fatimah dkk., 2022:197, Sopiensyah dkk., 2022:40) dan penguatannya dapat diupayakan melalui lokakarya yang menghasilkan pula implementasi teknis (Yoesdiarti dkk., 2022:79). Strategi ini memerlukan usaha dan pemikiran mendalam karena, dalam studi lain ditemukan bahwa, menurut pelaksana program, penyesuaian kurikulum merupakan hambatan terbesar dalam pelaksanaan MBKM (Mulyana dkk., 2022:1562 dan Fuadi dkk., 2021 dalam Mulyana dkk., 2022:1562). Meskipun begitu, strategi penyesuaian kurikulum yang adaptif dan fleksibel ini merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di perguruan tinggi (Lathif dkk., 2022:279) dan dapat meringankan serta mempercepat penyelesaian studi mahasiswa (Siswanto dkk., 2021:1067). Penyesuaian kurikulum hingga teknis aplikasi program MBKM ini, pada tahap berikutnya, memerlukan pula strategi sosialisasi (Yoesdiarti dkk., 2022:79, Lathif dkk., 2022:277) untuk merespon salah satu faktor utama kekhawatiran mahasiswa dalam mengikuti MBKM, seperti dapat dilihat pada Gambar 3, berupa kurangnya informasi tentang program tersebut (Mulyana dkk., 2022:1556).

Strategi 4, yaitu “integrasi pendanaan dengan pihak pemilik modal atau hibah” menjadi penting karena mahasiswa cenderung memilih program pembelajaran yang dapat memberikan keringanan pembiayaan (Rochana dkk., 2021:17). Berdasarkan studi pada prodi subjek, seperti terlihat pada Gambar 3, pembiayaan menjadi faktor kekhawatiran utama bagi mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM dan hal ini pun didukung oleh studi di institusi lain (Panjaitan dkk., 2022:360). Pengelola program dapat mengupayakan keikutsertaan dalam hibah program serta mengarahkan mahasiswa mengikuti program MBKM nasional untuk memudahkan pendanaan (Yoesdiarti dkk., 2022:79).

Tidak seperti keempat strategi sebelumnya, strategi 5, yaitu “memulai dari yang sederhana” merupakan strategi yang belum ditemukan pada acuan studi pustaka. Hal ini dimungkinkan karena opini lain yang memilih untuk langsung menerapkan program sesuai standar. Meski begitu, strategi ini dapat diterapkan pada penyelenggara program dengan kapasitas institusi kecil yang berencana melangkah kepada penerapan program MBKM.

Partisipasi dan Kolaborasi

Partisipasi dalam strategi program MBKM dicapai dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa menjadi bagian dari program di luar kurikulum kampus yang mereka yakini dapat memberikan manfaat dalam proses studi mereka, dan sejalan dengan itu, memberikan kesempatan juga untuk mahasiswa memilih program perkuliahan dengan kurikulum reguler. Terkait upaya kolaborasi dalam program MBKM, hal ini dicapai dengan mendukung strategi 3. Untuk mendukung strategi 3,

yakni mendapatkan dokumen kerja sama dengan mitra, pada tahap awal, pengelola program dapat memperbarui kerja sama dengan mitra pada program terdahulu ataupun membuka program baru dengan mitra yang sudah dimiliki (Yoesdiarti dkk., 2022:79). Pengembangan selanjutnya, strategi pendekatan dapat diarahkan pada mitra perguruan tinggi lain maupun industri (Rahmawati dkk., 2022:10724) serta pihak lain. Selain pendekatan, sosialisasi dan penyamaan tingkat pemahaman dengan mitra yang meningkatkan partisipasi mitra perlu dilakukan sebagai antisipasi hambatan kolaborasi dalam program (Naing dkk., 2022:95). Dengan keterlibatan tersebut, kolaborasi antara pihak pengelola program, dalam hal ini prodi perguruan tinggi, dengan pengguna lulusan, industri, pemerintah, dan kelompok masyarakat, dapat tercapai.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil studi, lima strategi adaptasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan pelaksanaan BKP MBKM yang kolaboratif dan partisipatif, yang dapat diterapkan pula pada prodi berbasis desain, adalah (1) identifikasi BKP Serupa yang sudah berjalan, (2) menyediakan variasi Pilihan BKP untuk merdeka memilih, (3) penyusunan perangkat pelaksanaan MBKM (4) integrasi pendanaan dengan pihak pemilik modal atau hibah, serta (5) memulai dari yang sederhana. Kolaborasi diperoleh dengan menyelaraskan kurikulum perkuliahan dengan kebutuhan mitra di lapangan, termasuk di dalamnya profesional di bidang industri dan kelompok-kelompok masyarakat, serta mengusahakan pendanaan program MBKM melalui penyingkronan dengan program swasta dan pemerintah. Partisipasi melalui keterlibatan mahasiswa menjadi dalam program di luar kurikulum kampus. Sejalan dengan itu, kemerdekaan juga diberikan untuk mahasiswa dapat memilih program perkuliahan dengan kurikulum reguler.

Saran yang diperoleh dari hasil wawancara adalah agar pihak pemerintah yang mendorong pelaksanaan MBKM, pada kasus ini, Kemendikbud, dapat menyediakan skema pendanaan yang menghubungkan pemilik modal untuk memudahkan pendanaan program atau memberikan skema lain yang mendukung kendala ini. Saran untuk studi berikutnya adalah membahas strategi penerapan MBKM untuk BKP yang jarang dapat terlaksana terutama pada prodi berbasis desain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) UKDW dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam skema Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugraheni, I. (2019). Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa dalam Menyelesaikan Permasalahan Bilangan Bulat Berbasis Media Realistik. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(3), 276–283. <https://doi.org/10.24246/j.js.2019.v9.i3.p276-283>
- Arifin, M. (2017). Strategi Manajemen Perubahan dalam Meningkatkan Disiplin di Perguruan Tinggi. *Jurnal EduTech*, 3(1), 117–132.
- Astunggoro, R., & Huda, M. A. (2021). *Nadiem Targetkan 150 Ribu Mahasiswa Belajar di Luar Kampus*. Artikel Daring Republika. <https://www.republika.co.id/berita/r1n8o9487/nadiem-targetkan-150-ribu-mahasiswa-belajar-di-luar-kampus>
- Astutik, D., Yuhastina, Ghufronudin, & Parahita, B. N. (2022). Guru dan Proses Pendidikan dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 12(1), 46–54. <https://doi.org/10.24246/j.js.2022.v12.i1.p46-54>
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205. <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591>

- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. (2021). *Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri* (2nd ed., Vol. 2). <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Buku-Panduan-IKU-2021-28062021.pdf>
- Fatimah, D., Isfiaty, T., Dharmawan, C., Derwentiana, R., & Maharlika, F. (2022). Penguatan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Program Studi Desain Interior-Universitas Komputer Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 10(2), 189–198.
- Febriarto, P. (2020). Penyesuaian Pembelajaran Menuju Kampus Merdeka (MBKM) dalam Merespon Pandemi Pembelajaran Merdeka Pendidikan Arsitektur. *Prosiding SMART: Seminar on Architecture Research and Technology #5 Volume 1*, 103–109. <https://smartfad.ukdw.ac.id/index.php/smart/article/view/149>
- Hunaepi, Firdaus, L., Samsuri, T., Susantini, E., & Raharjo. (2020). Efektifitas Perangkat Pembelajaran Inkuiri Terintegrasi Kearifan Lokal terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(3), 269–281.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Strategi Implementasi BKP Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi*. <https://webinar.darmajaya.ac.id/go/wp-content/uploads/2020/11/Strategi-BKP-MBKM-dalam-KPT.pdf>
- Lathif, N., Garnasih, Y., Milonno, Y. K., Siswajanthi, F., Handoyo, S., & Wijaya, M. M. (2022). Implementasi Program Kebijakan MBKM untuk Menciptakan Karakter Mahasiswa Fakultas Hukum yang Profesional. *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(1), 277–293. <https://doi.org/10.33751/palar>
- Mulyana, M., Wahyudin, Y., Lesmana, D., Muarif, M., Mumpuni, F. S., & Farastuti, E. R. (2022). Evaluasi Dampak Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Bidang Studi Akuakultur. *Edukatif: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 4(1), 1551–1564. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2182>
- Naing, N., Hadi, A. K., & Asdar. (2022). Model Kolaborasi Pembelajaran Riset Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Berbasis Smart Settlement Untuk Mitigasi Bencana Banjir pada Program MBKM Jalur Proyek Kemanusiaan. *LOSARI : Jurnal Arsitektur, Kota Dan Permukiman*, 7(1), 83–97. <http://jurnal.ft.umi.ac.id/index.php/losari/article/view/070102202208>
- Panjaitan, M., Rini, A. D., Agusalm, L., Abdullah, Z., Purwandaya, B., & Pasaribu, B. (2022). Persepsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trilogi terhadap Program Belajar Merdeka Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(2), 351–361. <https://doi.org/10.36908/isbank>
- Purwanti, E. (2021). Preparing the Implementation of Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Policy in Higher Education Institutions. *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020–Social, Humanity, and Education (ICoSIHESS 2020)*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 518.*, 384–391.
- Rahmawati, R., Pujilestari, S., & Hamidatun, H. (2022). Strategi Pengembangan SDMDalam Mendukung Kebijakan MBKMDi Fakultas Teknologi Pangan Dan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 2656–6753. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/viewFile/2770/2752>
- Rochana, Darajatun, R. M., & Ramdhany, M. A. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka terhadap Minat dan Keterlibatan Mahasiswa. *Journal of Business Management Education*, 6(3), 11–21. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JBME/article/view/40165>
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 425–434. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.737>

Strategi Adaptasi Penerapan Program MBKM yang Kolaboratif dan Partisipatif
(Stefani N. Sabatini, Patricia P. Novianri, Sita Y. Amijaya)

- Rusmana, Y. A. (2020). Merdeka Belajar pada Perubahan Bentuk STARS YKPN Yogyakarta di Era Pandemi Covid-19. *Prosiding SMART: Seminar on Architecture Research and Technology #5 Volume 1*, 111–120. <https://smartfad.ukdw.ac.id/index.php/smart/article/view/150>
- Siswanto, D., Setiawidayat, S., Istiadi, & Rofii, F. (2021). Strategi Implementasi MBKM di Program Studi Teknik Elektro Universitas Widyagama Malang. *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, 1061–1068.
- Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34–41.
- Winata, S. (2020). Praktik Arsitek dalam Pencarian Keseimbangan Baru. *Prosiding SMART: Seminar on Architecture Research and Technology #5 Volume 1*, 3–12. <https://smartfad.ukdw.ac.id/index.php/smart/article/view/142>
- Yoesdiarti, A., Amril, L. O., Kardaya, D., Handarini, R., & Yektyastuti, R. (2022). Strategi Pengembangan Program Pembelajaran MBKM Dalam Rangka Peningkatan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 71–81.